

Artikel 10

by Paper 10

Submission date: 01-Dec-2022 07:51PM (UTC+0700)

Submission ID: 1968206685

File name: STUDI_PKN_TERHADAP_PENGUATAN_KEPEMERINTAHAN_DAERAH.pdf (268.53K)

Word count: 5993

Character count: 42572

STUDI PKN TERHADAP PENGUATAN KEPEREMINTAHAN DAERAH YANG BAIK MELALUI PENGEMBANGAN BUDAYA DEMOKRASI PADA KINERJA APARATUR DI PEMDA PROVINSI MALUKU

Oleh : Abd. Jabar Abdul

ABSTRAK

Tulisan ini menyajikan laporan hasil penelitian tentang studi PKN terhadap penguatan pemerintahan daerah yang baik melalui pengembangan budaya demokrasi pada kinerja aparatur pemda Provinsi Maluku. Permasalahan penelitian adalah 1) bagaimana kinerja aparatur dalam pelaksanaan pemerintahan daerah yang baik di pemda Provinsi Maluku; 2) bagaimana pengembangan budaya demokrasi pada kinerja aparatur di pemda Provinsi Maluku dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan daerah; 3) bagaimana peran PKN terhadap penguatan pemerintahan daerah yang baik di pemda provinsi Maluku. Metode Penelitian menggunakan grounded theory. Pengumpulan data menggunakan Teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Data diolah secara kualitatif melalui reduksi data, display/penyajian data, dan *conclusion/verification*.

Hasil penelitian menunjukkan; 1) pemahaman aparatur terhadap konsep *good governance* cukup baik, namun implementasinya pada kinerja aparatur belum optimal, penerapan prinsip-prinsip GG belum memenuhi harapan masyarakat. Kerja sama dan sinergitas antara pemda dengan masyarakat (*civil society*) belum terbangun secara baik sehingga pengelolaan sumber daya daerah masih lebih didominasi pemda; 2) Pengembangan budaya demokrasi pada kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan daerah telah mendapat perhatian aparatur untuk menerapkan nilai-nilai demokrasi namun belum berdampak nyata pada ukuran kinerja berkualitas yang memberikan harapan, kepercayaan dan terpenuhinya hak-hak masyarakat secara maksimal karena diperhadapkan dengan aparat yang masih bermental priayi dan primordialis; Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis terhadap penguatan pemerintahan daerah yang baik, olehnya itu Gerakan pendidikan kewarganegaraan perlu digelorakan bukan saja secara kurikuler di lingkungan pendidikan formal, tetapi juga secara *socio-cultural development* dan *socio-political intervention* di lingkungan masyarakat, tokoh-tokoh organisasi, aparatur pemeneintah daerah, dan actor-aktor politik perlu mendapat perhatian semua pihak dan dukungan kebijakan politik pemerinrah daerah.

Kata Kunci : PKN, Good Governance dan Budaya demokrasi.

PENDAHULUAN

¹ Pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan untuk untuk mewujudkan administrasi pemerintahan yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan dengan mempraktikkan prinsip *good governance* telah mengundang banyak perhatian masyarakat bangsa Indonesia saat ini bersamaan dengan besarnya harapan kepada pemerintah untuk memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi ¹ fenomena menurunnya kualitas moral bangsa yang diindikasikan oleh membudaya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), lemahnya penegakkan hukum serta komitmen dan profesionalisme aparatur sehingga kedepan tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan pelayanan public yang lebih baik dan kebutuhan dasar yang diharapkan masyarakat (Sedarmayanti:2003) (Megawangi 2004: 3).

¹ Beramaan dengan kompetisi dunia menumbuhkan kembali semangat demokratisasi, pengalaman sejarah mengajak bangsa Indonesia menggunakan demokrasi terbuka sejak tahun 1998 yang merupakan momentum baru dalam sejarah pelaksanaan demokrasi di Indonesia dengan dilakukannya amandemen UUD 1945, dan ditetapkannya UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah.

Atas dasar UU tersebut maka daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan daerahnya sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan dalam konteks negara Kesatuan Republik Indonesia, agar daerah lebih memacu diri dalam proses percepatan perwujudan kesejahteraan masyarakat, penciptaan daya saing daerah dan pertumbuhan proses demokratisasi.

Dalam suasana otonomi daerah dan proses demokratisasi, rakyat kemudian bebas menyalurkan aspirasi, pikiran, sikap dan perilaku sosial politik, sembari tidak (belum) dibarengi dengan pemahaman memadai tentang demokrasi yang sebenarnya. Akibatnya peran dan partisipasi masyarakat (civil society) cenderung pada fragmentasi kepentingan politik praktis daripada orientasi penanganan problem dasar yang dihadapi masyarakat.

Disamping itu pelimpahan kewenangan pusat pada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerahnya telah pula berinflikasi pada kecenderungan terjadinya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di lingkungan pejabat dan aparatur pemerintahan daerah yang mengindikasikan lemahnya integritas moral, dan profesionalitas kinerja aparatur dalam pengelolaan sumber daya daerah dengan pelayanan public yang berkualitas dan prorakyat.

Keadaan tersebut semakin diperparah oleh penyelenggaraan pendidikan money politik, kekerasan dan penggunaan kekuasaan yang tidak jarang memicu munculnya demonstrasi, unjuk rasa, pengerahan massa dan gejolak anarkis, bahkan sederetan perkelahian antar etnis dan kelompok kepentingan, sehingga pada akhirnya kepala daerah yang terpilih lebih terkonsentrasi pada bagaimana mengembalikan hutang-hutang politik dan dan mengamankan kepentingan politik para pendukungnya, ketimbang memikirkan bagaimana pemerintahan daerah yang baik dan demokratis dapat dijalankan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pencapaian daya saing daerah.

¹ Hal tersebut menunjukkan bahwa kemauan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang baik dan pertumbuhan proses demokratisasi saja tidak cukup tanpa dibarengi dengan penguatan kapasitas, integritas dan kualitas sumber daya manusia sehingga aparatur pemerintahan daerah, elit politik dan warga masyarakat memiliki kompetensi pengetahuan, ketrampilan dan akhlak kewarganegaraan sebagai modal dasar bagi pengembanagan peran masing-masing untuk memperteguh pelaksanaan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara demi mewujudkan Susana kehidupan masyarakat yang sejahtera adil dan Makmur lahir dan batin.

Dalam kaitan ini, maka pendidikan kewarganegaraan memiliki arti penting bagi penguatan pemerintahan daerah yang sesuai dengan misi yang diemban PKn adalah untuk membentuk kepribadian bangsa, yakni sebagai upaya sadar dalam “*nation and character building*”, dengan tujuan terwujudnya partisipasi penuh nalar dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik warga negara yang taat pada nilai-nilai dan prinsip demokrasi konstitusional Indonesia (Winapatura & Budimansyah 2007:1).

Misi dan tujuan tersebut seterusnya dikembangkan secara Bersama secara kolaboratif oleh sekolah, orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam domain kurikuler, akademik, dan sosiokultural yang diorganisasi secara lintas bidang keilmuan dimana isi dan prosesnya dikaitkan dengan kehidupan nyata, yang difasilitasi melalui proses pembelajaran yang bersifat demokratis dan partisipatif.

Permasalahannya ke udian adalah “bagaimana pendidikan kewarganegaraan bisa berperan terhadap penguatan pemerintahan daerah yang baik melalui pengembangan budaya demokrasi pada kinerja aparatur di pemda Provinsi Maluku, dengan fokus permasalahan; 1) bagaimana kinerja aparatur pemda dalam pelaksanaan pemerintahan daerah yang baik ; 2) bagaimana pengembangan budaya demokrasi pada kinerja aparatur di pemda Provinsi Maluku; 3) bagaimana peran PKn terhadap penguatan pemerintahan daerah yang baik di pemda Provinsi Maluku.

TINJAUAN TEORITIS

1. *Good Governance* dan Kinerja Aparatur

United nations Development Programe (UNDP) merumuskan istilah *governance* sebagai suatu exercise dari kewenangan politik, ekonomi dan administrasi untuk menata, mengatur dan mengelola masalah-masalah sosialnya (Rohman, 2009 71). UNDP mendefenisikan *governance* sebagai “how government fungcion and works together with other to make decisions and take action to deal with the needs of it’s citizens”. *Good governance* dimaksudkan adalah bagaimana pemerintah berfungsi dan bekerja untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Jadi *good governance* mensyaratkan hubungan yang sinergis dan konstruktif antara negara sector swasta dan masyarakat (*civil society*). (Sedarmayanti, 2003).

Rohman (2009), Tjokroamidjojo (2001) mengutarakan paradigma *governance* atau institusi pembangun *governance* meliputi tiga domain utama yaitu adanya state (negara), private sector (sector swasta dan dunia usaha) serta *civil society* (masyarakat).

Mereka didorong untuk saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing. Pemerintah berperan sebagai fasilitator dan enabling yang memungkinkan masyarakat berperan aktif sebagai pelaku ekonomi dan sosial, serta menciptakan lingkungan politik, dan hukum yang kondusif. Sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan melalui produksi barang dan jasa, sedangkan *civil society* berperan positif dalam partisipasi dan interaksi sosial, ekonomi, politik. Intinya adalah adanya partnership dan sharing antara ketiga institusi dalam domain *governance*.

Good governance dalam arti sebagai tata Kelola pemerintahan yang baik menjadi impian seluruh bangsa di dunia. Bukan saja bagi masyarakat tetapi juga bagi aparat birokrasi yang mendambakan terciptanya profesionalitas dalam berkarya. Good governance dapat dipahami sebagai good exercise of power, yang menyangkut akuntabilitas, transparansi, efisiensi, responsive, adil, efektif, taat hukum, partisipatif, berorientasi consensus, dan produktiitas (Suparno, 2010).

Lebih lanjut Suparno menjelaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya melibatkan orang atau individu yang ada dalam organisasi atau Lembaga tetapi juga melibatkan kultur, sistim yang dibangun, public, pengusaha, LSM, industry, dan lain sebagainya. Karena itu upaya pembangunanpun harus dengan pendekatan holistic, komprehensif, dengan melibatkan banyak Lembaga dan cara pandang, sehingga membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

Healy dan Robinson (Istianto: 2009) menjelaskan bahwa good governance tingkat efektivitas organisasi yang tinggi dalam hubungan dengan formulasi kebijakan dan kebijakan yang senyatanya dilaksanakan, khususnya dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi dan kontriuisnya pada pertumbuhan, stabilitias dan kesejahteraan rakyat. Pemerintahan yang baik juga bermakna akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan keterbukaan.

Asian Development Bank menegaskan adanya consensus umum bahwa good governance dilandasi oleh empat pilar yaitu; 1) accountability, 2) transparency, 3)

predictability, dan 4) participation. Sementara Bappenas dalam (Loina Lalolo 2003) menegaskan paling tidak ada tiga prinsip utama yang melandasi good governance yaitu; 1) akuntabilitas, 2) transparansi, dan 3) partisipasi masyarakat. Akuntabilitas merupakan persyaratan untuk melaporkan kinerja yang dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah disepakati sebelumnya kepada jenjang otoritas yang berada langsung di atasnya. Salah satu cara untuk memahami akuntabilitas adalah dengan melihat garis kewenangan dan tanggung jawab (Istianto 2009: 121).

Public Manajemen International Institute dalam Istianto (2009) menegaskan pada hakekatnya ada tiga prinsip utama dari akuntabilitas. Ketiga prinsip tersebut adalah; 1) akuntabilitas merupakan garis kewenangan dan tanggung jawab atas tindakan yang diambil; 2) akuntabilitas merupakan kewenangan yang dimiliki oleh rakyat untuk mengetahui bagaimana uang public digunakan untuk kepentingan masyarakat; dan 3) akuntabilitas juga akan memastikan apakah pejabat public yang dipilih bertanggung jawab kepada rakyat atas keputusan-keputusan dan cara mereka menerapkan kebijakan dan program.

Sofyan Efendi (Surjadi 2009: 20) menuturkan bahwa perbedaan paling pokok antara konsep government dan governance terletak pada bagaimana cara penyelenggaraan otoritas politik, ekonomi dan administrasi dalam pengelolaan suatu bangsa. Konsep government berkonotasi peranan pemerintah lebih dominan dalam penyelenggaraan berbagai otoritas politik, ekonomi, dan administrasi.

Sedangkan governance mengandung makna bagaimana cara suatu bangsa mendistribusikan kekuasaan dan mengelola sumber daya dan ber bagai masalah yang dihadapi masyarakat secara demokratis, adil, transparan, rule of law, partisipatif dan kemitraan yang diletakan pada bersinerginya tiga pilar pokok yaitu : pemerintah, civil society dan private sector (pengusaha/swasta).

Peran penting lainnya bagi keberhasilan pelaksanaan good governance adalah kinerja aparatur sebagai unsur organisasi pemerintah yang membantu pemerintah dalam

mentransformasikan prinsip good governance dalam perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan terhadap implementasi kebijakan pemerintah. Istilah kinerja sering disamakan dengan performace atau activities. Kinerja umumnya dihubungkan dengan aktivitas seseorang baik secara pribadi sebagai makhluk hidup atau makhluk sosial, maupun dalam konteks organisasi atau Lembaga swasta maupun pemerintah yang mencakup keterlibatan aspek kegiatan, program, kebijakan, person, organisasi atau Lembaga, tugas dan tanggung jawab, mekanisme, ukuran, ideologi, budaya, serta akuntabilitas pelaksanaan untuk mewujudkan visi dan tujuan yang hendak dicapai (Darmawan, 2009: 83).

Menurut Darmawan kinerja kelembagaan merupakan hasil atau keluaran dari suatu proses seperangkat dan kinerja individual, berupa perilaku nyata yang ditunjukkan oleh seorang pegawai pada waktu ia melaksanakan fungsi, paran, dan tugasnya. Kinerja pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan aktivitas kehidupan manusia baik zecara fisik maupun mental.

Fadel Muhammad menjelaskan kinerja pemerintah daerah merupakan kinerja dari organisasi atau instansi pemerintah daerah. Oleh karena itu defenisi kinerja organisasi dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kinerja organisasi pemerintah sebagaimana yang disampaikan Daft (Muhammad 2008: 14) bahwa kinerja organisasi diartikan sebagai kemampuan organisasi untuk meraih tujuanya melalui pemakaian sumber daya secara efisien dan efektif.

Oleh karena aparatur emerintah daerah tergolong dalam unsur organisasi public, maka kinerjanya dapat dinilai sampai seberapa jauh ia memenuhi tuntutan public melalui pemberian public goods, atau autcome-based governance(Roooyen dkk dalam Muhammad, 2008: 15) Kinerja Pemerintah juga menunjukkan sampai seberapa jauh pemerintah melaksakan tugas dan fungsinya sebagaimana dijanjikan kepada public.

Sementara Hwang Sun Kang menggunakan ukuran kinerja pemerintah melalui kriteriaworkload yakni; Efficiency, effectiveness, dan productivity. Efficiency

menunjukkan perbandingan antara input dan output. Karena mengukur efisiensi pada instansi pemerintah sering tidak sulit, maka Hwang-Sun Kang menyarankan untuk menggunakan social efficiency yaitu mengukur tingkat kesesuaian kegiatan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. Efektifitas menunjukkan perbandingan antara output dengan outcome atau tingkat ketercapaian hasil akhir setelah output diperoleh. Sedangkan productivity menunjukkan jumlah hasil yang dicapai pada kurun waktu tertentu (Muhammad, 2008: 15).

2. Hubungan Birokrasi dan Demokrasi

Eva Etzioni Halevy (2011) dalam tulisannya tentang Demokrasi dan Birokrasi berkesimpulan bahwa ada hubungan yang simbiotik tapi sekaligus kontradiktif antara birokrasi dengan politik demokrasi sehingga menimbulkan perselisihan dan konflik antara birokrat-birokrat senior dengan para politisi senior. Perselisihan dan konflik ini sebenarnya dipicu oleh perebutan pengaruh dan pertarungan kekuasaan antara kelas-kelas yang berkuasa dimana masing-masing menggunakan berbagai cara, baik yang halal maupun tidak.

Mosca (Etzioni 2011: 343) menyatakan bahwa demokrasi yang dibiarkan berjalan tanpa ada pengekang akan cenderung untuk menimbulkan terjadinya jual beli pengaruh, yaitu korupsi, yang pada akhirnya akan melanggar prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. Olehnya itu birokrasi, politisi dan partai politik tidak dapat dilepaspisahkan dalam perebutan kekuasaan, dan bentengnya adalah demokrasi, dan demokrasi hanya bisa berjalan lancar ketika birokrasi sudah berkembang dan bisa bertindak secara independent dari politik partai. Jadi birokrasi yang independen dari politik partai merupakan syarat bagi kelancaran demokrasi, tapi sekaligus ancaman bagi demokrasi.

Kehadiran demokrasi dapat memberi imbang terhadap zezim otoriter dalam birokrasi pemerintahan. Menurut Marx, demokrasi menjadi sesuatu yang berharga bukan hanya karena demokrasi adalah sebuah tatanan yang berbanding terbalik dengan kekuasaan borjuis, yaitu bahwa semakin kuat demokrasi maka semakin lemah kekuasaan

borjuis. Tapi juga sekaligus berbanding terbalik dengan konsentrasi kekuasaan pada negara, sehingga berbanding terbalik juga dengan konsentrasi kekuasaan pada birokrasi (Etzioni 2011: 19).

Mosca (Etzioni 2011: 24) menilai dalam sistem negara demokrasi parlementer sekalipun, sebenarnya bukanlah perwujudan dari kedaulatan rakyat, atau pemerintahan atas persetujuan dari yang diperintah atau pemerintahan oleh mayoritas seperti yang dikenal oleh teori demokrasi, melainkan yang terjadi adalah tetap sama saja, yaitu sebuah kelompok minoritas yang terorganisir yang memaksakan kehendaknya terhadap mayoritas yang tidak terorganisir. Namun demikian sistem ini dipandang masih lebih baik dibandingkan daripada bahaya yang ditimbulkan oleh pemerintahan yang tidak menggunakan parlemen. Paling tidak parlemen yang anggotanya dipilih oleh rakyat masih bisa memberikan kendali dan pertimbangan (*check and balance*) terhadap kekuasaan dari mereka yang memegang kekuasaan, sehingga mencegah agar para birokrat tidak menjadi sewenang-wenang (Etzioni 2011: 25).

Munculnya teori-teori modern seperti pluralisme dan kelebihan beban kerja pemerintah telah memberi ruang gerak besar bagi perkembangan demokrasi di era abad 20 dimana kekuasaan politik makin terfragmentasi dan tersebar. Kalau dulunya absolutisme yang menandai kekuasaan negara yang tersentralisir, kemudian digeser oleh demokrasi dengan kecenderungan kekuasaan negara makin terdesentralisasi dan tak terfokus.

Birokrasi dalam pandang pluralism, para birokratnya tidak mampu memerintah sendirian tanpa orang-orang di luar birokrasi itu sendiri juga tidak bisa memerintah kalau tidak dibantu dengan birokrasi. Birokrasi tidak selalu bisa mencapai tujuan-tujuannya sendiri tapi birokrasi mampu menghambat agar orang lain tidak bisa mencapai tujuan mereka. Birokrasi dikekang oleh elit politik tetapi elit politik pun juga dipengaruhi dan dikekang oleh kelompok-kelompok lainnya (Rourke dalam Etzioni 2011: 65).

Menurut teori kelebihan beban kerja pemerintah yang dicetuskan D. Bell, M. Crezier, S.P. Hutington, A. King dkk., akhir-akhir ini terjadi peningkatan pada tekanan yang diterima pemerintah untuk memenuhi permintaan masyarakat yang terus bermunculan jenisnya dan makin lama makin besar tuntutan. Permintaan masyarakat ini terjadi karena adanya revolusi atau perubahan berskala besar seperti makin banyaknya jumlah kelompok-kelompok kepentingan yang gterlibat dalam kegiatan politik, makin besar pengharapan dari kelompok-kelompok ini bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan mereka, dan meningkatnya pemahaman dari kelompok-kelompok ini tentang apa yang menjadi kebutuhan mereka. (Etzioni 2011: 96).

Dari pandangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa birokrasi dan demokrasi memiliki hubungan fungsional dan korektif, keduanya saling mengisi dan mendukung serta sekaligus kontradiktif terutama dalam hal menyangkut “peran” dan ketidakjelasan “aturan” mengenai hubungan antara birokrasi dan politik, sebagai missal birokrasi harus tunduk pada kebijakan politik, namun disisi lain birokrasi dituntut independent dari politik. Namun demikian kehadiran demokrasi dalam ruang birokrasi selain memberi ruang kompetisi bagi semua kelompok masyarakat juga adalah demokrasi libido dan arogansi birokrasi dan elit politik akan terkikis dengan adanya control dan pengawalan public terhadap keberlanjutan legitimasi kekuasaan.

3. Peran PKn Terhadap Pengembangan Budaya Demokrasi

Proses demokrasi membutuhkan topangan budaya demokrasi yang *genuine*. Tanpa dukungan budaya demokrasi, proses transisi demokrasi akan rentan terhadap berbagai ancaman budaya dan perilaku yang tidak demokratis, seeperti perilaku anarkis dalam menyalurkan pendapat, politik uang (*money polics*), *pengarahan* massa untuk tujuan politik, dan penggunaan symbol-simbol primordial dalam berpolitik seperti suku dan agama.

Azyumardi Azra (Ubaidillah & Rozak 2000: 13) menyetengahkan konsep *indogenuus demokrasy* yakni demokrasi yang tumbuh dan berakar pada kehidupan masyarakat. Jika nilai-nilai demokrasi tumbuh dan berkembang dalam perilaku keseharian warga negara maka akan mendorong perkembangan demokrasi yang mapan (*established democracy*). Sebaliknya, jika nilai-nilai demokrasi tersebut tidak dikembangkan atau diaplikasikan dalam kehidupan nyata oleh warga negara dalam kehidupannya, maka demokrasi berada dalam keadaan yang rentan (*fragile democracy*). Karena itu nilai-nilai demokrasi perlu ditumbuh-kembangkan dalam kehidupan setempat/local, sebagai akar untuk pengembangan demokrasi dalam kehidupan bangsa dan negara.

Menurut Azumardi Azra Indonesia membutuhkan demokrasi keadaban (*civilitized democracy*) atau seperti apa yang dikatakan Robert W. Heffner sebagai keadaban demokrasi (*democratic civility*). Namun demikian, menuju tatanan demokrasi keadaban yang lebih genuine dan autentik bukanlah hal yang mudah dan instan, sebaliknya membutuhkan proses pengenalan, pembelajaran, dan pengalaman (*learning by doing*), serta pendalaman demokrasi. Proses ini dimaksudkan dalam rangka mengembangkan budaya demokrasi (*democratic culture*). Salah satu cara untuk mengembangkan budaya demokrasi berkeadaban adalah melalui upaya sistematis dan sistemik dalam bentuk pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) yang secara konseptual menjadi wahana pendidikan demokrasi dan pendidikan HAM dalam konteks pembangunan masyarakat madani (*civil society*).

Para pendidik kewarganegaraan di seluruh dunia mengakui bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah mengajar dan belajar prinsip-prinsip dan mempraktikkan “demokratie” *governance and citizens*”. Komponen-komponennya yang saling berinterelasi adalah “civic knowledge”, “civic skills” and civic virtue” (Wahab 2011: 15). “Civic knowledge” berisi gagasan fundamental dan informasi yang harus diketahui siswa/pemuda agar menjadi warga negara yang efektif dan bertanggung jawab. Secara umum civic knowledge mencakup pula prinsip-prinsip dari teori demokrasi,

pelaksanaan demokrasi, pemerintahan yang demokratis, dan perilaku demokrasi warga negara.

³ Pendidikan kewarganegaraan (civic education) merupakan subjek pembelajaran yang mengemban misi untuk membentuk kepribadian bangsa, yakni sebagai upaya sadar dalam “*nation and character building*” Dalam konteks ini peran PKn bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara sangat strategis, suatu negara demokrasi pada akhirnya harus bersandar pada pengetahuan, ketarampilan dan kebijakan dari warga negaranya dan orang-orang yang mereka pilih untuk jabatan public (Winataputra & Budimansyah 2007: i)

Lebih lanjut Winataputra & Budimansyah 2007: 1) ³ mempertegas tujuan PKn adalah terwujudnya partisipasi penuh nalar dan tanggung jawab dalam kehidupan politik warga negara yang taat pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional Indonesia. Untuk dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh tanggung jawab dalam urusan-urusan public, diperlukan seperangkat ilmu pengetahuan dan keterampilan intelektual dan keterampilan berperanserta. Keterampilan ini pada gilirannya ditingkatkan lebih lanjut melalui pengembangan watak yang dapat meningkatkan kemampuan individu warga negara berperanserta dalam proses politik, yang selanjutnya dapat mendukung berfungsinya sistem politik yang sehat. Karena itu PKn berfokus pada tiga komponen dasar pengembangan, yaitu pengembangan pengetahuan, pengembangan keterampilan, dan pengembangan watak atau karakter kewarganegaraan.

Dalam rekomendasi yang disampaikan Civic Education Policy Study (CEPS) menekankan bahwa PKn ⁴ itu perlu untuk mengantarkan warga negara yang seyogiayanya memiliki lima karakter (ciri) utama yaitu; jati diri, kebebasan untuk menikmati hak tertentu, pemenuhan kewajiban-kewajiban terkait, tingkat minat dan keterlibatan dalam urusan public, dan pemilikan nilai-nilai dasar kemasyarakatan. Karena itu PKn harus dilihat sebagai kegiatan pendidikan yang bersifat komprehensif isi maupun

penanganannya, dalam hal mana sekolah dan semua unsur dalam masyarakat bekerja sama secara sinergis (Winataputra & Budimansyah 2007: 2).

Gross dan Zeleny (Budimansyah 2010: 109) mengaitkan penggunaan istilah “*civics*” dan “*citizenship education*” ebagai berikut; “*civics*” pada dasarnya berkenaan dengan pembahasan mengenai pemerintahan demokrasi dalam teori dan praktik, sedangkan “*citizenship education*” berkenaan dengan keterlibatan dan partisipasi warga negara dalam masyarakat. Kedua aspek ini biasanya diajarkan dalam satu mata pelajaran dengan penggunaan istilah “*civics*” dan “*citizenship education*” secara bertukar pakai.

Budimansyah (2008: 135) menjelaskan bahwa dari perspektif sosiologis, transformasi budaya demokrasi dapat dilakukan melalui tiga usaha berikut; pertama, menggali potensi diri, mengevaluasi dan memaksimalkan nilai-nilai unggul untuk mendorong perkembangan karakter bangsa; kedua, mendorong interaksi yang sehat di kalangan anggota masyarakat. Interaksi demikian akan terjadi apabila setiap anggota masyarakat menjunjung tinggi prinsip kesamaan derajat (*egaliter*), kesamaan atas keterlibatan (*equal involvement*) dan keterbukaan (*openness*). Prinsip-prinsip ini akan menjadi sendi masyarakat yang dinamis, sekaligus menjadi habitat subur tumbuhnya nilai-nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan toleran. Ketiga, pola-pola interaksi yang sehat merupakan modal tumbuhnya komunitas responsive tidak represif terhadap warganya, dan sebaliknya tidak membiarkan individu berperilaku semena-mena (Budimansyah 2008: 135).

Demokrasi tidak hanya didengungkan, etapi lebih dari itu harus disemaikan, ditanamkan, dipupuk dan dibesarkan melalui upaya-upaya yang terencana, teratur dan terarah pada seluruh lapisan masyarakat. Jika tidak, sangat boleh jadi pohon demokrasi yang mulai tumbuh akan layu dan mati sebelum sempat berurat akar. Karena itu pendidikan kewarganegaraan baik monteks maupun prosesnya merupakan bagian fundamental bagi upaya pengembangan budaya demokrasi membangun *mind set* (kerangka berpikir) dan setting sosial (rancangan masyarakat) yang demokratis,

⁸ menjadikan demokrasi sebagai *way of life* (pandangan hidup) dalam menuntun tata kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, pemerintahan, dan kenegaraan. Pemerintahan demokratis membutuhkan kultur demokrasi untuk membuatnya *performed* (eksis dan tegak), dan ⁸ pemerintahan yang baik dapat tumbuh dan stabil bil masyarakat punya sikap positif dan proaktif terhadap norma-norma dasar demokrasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMHASAN

1. Kinerja Aparatur dalam Pelaksanaan *Good Governance*

² Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman aparatur terhadap konsep *good governance* cukup baik, demikian halnya agenda utama pemerintah daerah memberikan indikasi menguatnya perhatian pemda untuk mewujudkan akuntabilitas pelayanan public dengan memperkuat kapasitas aparatur dan pembenahan sistem manajemen modern birokrasi, dan orientasi pada penanganan masalah dsar yang dihadapi masyarakat.

¹ Kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan daerah sesuai tugas pokok yang diemban selalu mengacu pada visi misi daerah, dan regulasi/aturan yang berlaku. Dalam perencanaan menggunakan pendekatan kebutuhan masyarakat dengan pola partisipasi dan pelibatan pihak terkait. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* seperti; transparansi, partisipatif, *rule of law*, *responsive*, *predictability* dan akuntabilitas diakui oleh aparat selalu mendapat perhatian dalam pelaksanaan tugas yang diemban. Namun demikian disadari bahwa ² kerja sama dan sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat (*civil society*) belum terbangun secara baik, peran pemerintah daerah masih terlalu dominan baik dalam perumusan kebijakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi maupun pengawasan. Sementara itu masyarakat (*civil society*) memandang kinerja aparatur dalam pelayanan public belum menunjukkan dilaksanakannya prinsip-prinsip *good governance* secara baik, hal ini terlihat dari sikap aparatur yang masih sangat birokratis, tertutup, berbelit-belit, tidak transparan dan terkesan pilih kasih terhadap warga yang membutuhkan jasa pelayanan public.

Atas dasar tersebut maka kinerja aparatur pemda Provinsi Maluku dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan daerah belum secara optimal memenuhi unsur atau karakter pelaksanaan tata Kelola pemerintahan daerah yang baik (*good governance*) sebagaimana konsep dan paradigma good governance yang dimaksudkan UNDP, ADB, BAPPENAS dan para pendukung konsep ini, sepanjang sinergi dan kerja sama civil society dan pemerintah daerah serta partisipasi, responsifitas, akuntabilitas, kesetaraan, epektifitas dan pengawasan masih tergolong cukup lemah, maka selama itu pula *good governance* tak akan tercapai (berada pada posisi lemah).

Kalaupun ada persepsi aparatur yang menyatakan kinerjanya dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan daerah, mulai dari perencanaan program sampai pada implementasi program selalau berorientasi pada pendekatan kebutuhan masyarakat sebagai indikasi dilaksanakannya prinsip responsivitas, transparansi dan akuntabilitas, maka hal ini tidak cukup untuk menyatakan *good governance* telah dilaksanakan ketika program yang diimplementasikan itu belum menyentuh atau memenuhi harapan (kebutuhan) masyarakat.

Statemen ini paling tidak didukung oleh beberapa alasan; pertama, kinerja bila dilihat sebagai hasil dari aktivitas, maka kinerja itu merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan visi organisasi (LAN). Kedua; bila kinerja dilihat dari aspek organisasi, maka kinerja merupakan tingkat yang menunjukkan seberapa jauh pelaksanaan tugas dapat dijalankan secara aktual dan misi organisasi tercapai (Janergen dalam Darmawan 2009). Kinerja organisasi juga diartikan sebagai kemampuan organisasi untuk meraih tujuannya melalui pemakaian sumber daya secara efisien dan epektif (Daft dalam Muhammad 2008).

Karena aparatur pemeritah daerah tergolong dalam unsur organisasi public, maka kinerjanya dapat dinilai dari sampai seberapa jauh ia memenuhi tuntutan public melalui pemberian *public goods*, atau *autocame-based governance* (Royen dalam Muhammad

2008). Dalam kaitan ini Hwang -Sung Kang (Muhammad 2008) menyatakan, karena untuk mengukur efisiensi pada instansi pemerintah seringa gak sulit, makai a menyarankan untuk menggunakan *social efficiency* yaitu mengukur tingkat kesesuaian kegiatan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat.

JP. Kotter dan S. Cohen (Buwono 2009) menyatakan orang terdorong untuk berubah karena ia “melihat” urgensi untuk berubah, “merasakan” kepentingan untuk berubah, dan selanjutnya “siap” untuk melakukan perubahan. Karena itu perubahan yang didorong dan diharapkan terwujud dalam proses *good governance* meniscayakan perlunya konsistensi dan keteladanan para pemangku kebijakan antara gagasan dan tindakan kinerja birokrasi sehingga aparatur benar-benar melihat dan merasakan arti pentingnya perubahan *mind set* dan budaya kerja birokrasi yang bisa berimplikasi terhadap peningkatan reputasi aparatur maupun optimalnya fungsi birokrasi dalam mewujudkan pelayanan public yang akuntabel.

Dengan demikian peneliti berpandangan bahwa ²kinerja aparatur pemda Provinsi Maluku dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan daerah masih dalam tarap proses menuju (berada diperjalanan) belum sampai pada tujuan yakni pelaksanaan *good governance* itu sendiri. Jadi kalau *good governance* menjadi alternatif dan pintu masuk bagi upaya mewujudkan pelayanan public yang prima, maka aparatur birokrasi tidak bisa hanya sebatas memahami terminology dan karakter dari *good governance*, tetapi memerlukan pemahaman dan penghayatan yang komprehensif tentang: *pertama*, filosofi keberadaan birokrasi; *kedua*, hakikat birokrasi adalah efisiensi dan rasionalitas (Weber), *ketiga*; tugas, fungsi dan peran aparatur sebagai makhluk berbudaya yang tidak bisa melepaskan hubungan dan tanggung jawabnya dengan Tuhan pencipta dan dengan lingkungan sosialnya. Jadi kata kuncinya adalah budaya kerja sebagai bentuk kesalehan birokrat, karena sistem manajemen hanya merupakan sebuah konstruk ideal sebagai instrument, dan instrument yang baik adalah yang bisa mengokohkan kesalehan birokrasi dan birokrasi yang saleh akan mampu memelihara dan menggerakkan sistem manajemen midern birokrasi.

2. Pengembangan Budaya Demokrasi dalam Kinerja Aparatur

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formal administrative nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan, kesetaraan, pluralism, kepatuhan atas aturan hukum, control public, dan kebebasan pers, selalu menjadi pertimbangan dan dilaksanakan aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan daerah sesuai tupoksi yang diemban. Namun demikian hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan budaya demokrasi dalam kinerja aparatur belum berjalan maksimal, hal ini terindikasi dengan masih terdapatnya perilaku aparatur yang bermental priyayi, feodal, ego sectoral, kurang responsive, terhadap kritikan, masih adanya penonjolan sikap dan perilaku primordialisme, foermalistik dan kurang transparan, atas dasar fenomena ini maka civil society memandang kinerja aparatur belum memenuhi harapan perwujudan hak-hak masyarakat secara maksimal dalam suasana yang demokratis.

Fenomena tersebut seolah-olah menunjukkan adanya hubungan yang terpisah antara implementasi nilai-nilai demokrasi dalam kinerja aparatur yang selalu menggunakan standar regulasi dan tupoksi di satu sisi dengan keterpenuhan hak-hak masyarakat sebagai pengguna jasa layanan public di sisi yang lain. Dalam keadaan semacam ini maka membudayakan demokrasi pada kinerja apartur menjadi amat penting karena dengannya akan menunjukkan aparatur birokrasi selain bertaat asas pada prinsip-prinsip demokrasi sebagai sistem penyelenggaraan pemerintahan, tetapi sekaligus kepatuhan terhadap prinsip-prinsip demokrasi akan dapat menghubungkan dan lebih memfungsionalisasikan kinerja aparatur terhadap harapan masyarakat yang membutuhkan jasa pelayanan public sehingga pada gilirannya akuntabilitas kinerja aparatur akan mendapat dukungan dan kepercayaan masyarakat.

Membudayakan demokrasi membutuhkan perubahan *mindset dan* perubahan perilaku mulai dari proses pengenalan, pembelajaran, pengalaman (pelaksanaan), dan pendalaman terhadap nilai-nilai demokrasi pada kinerja nyata aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan public yang berkualitas, adil, transparan, responsif dan

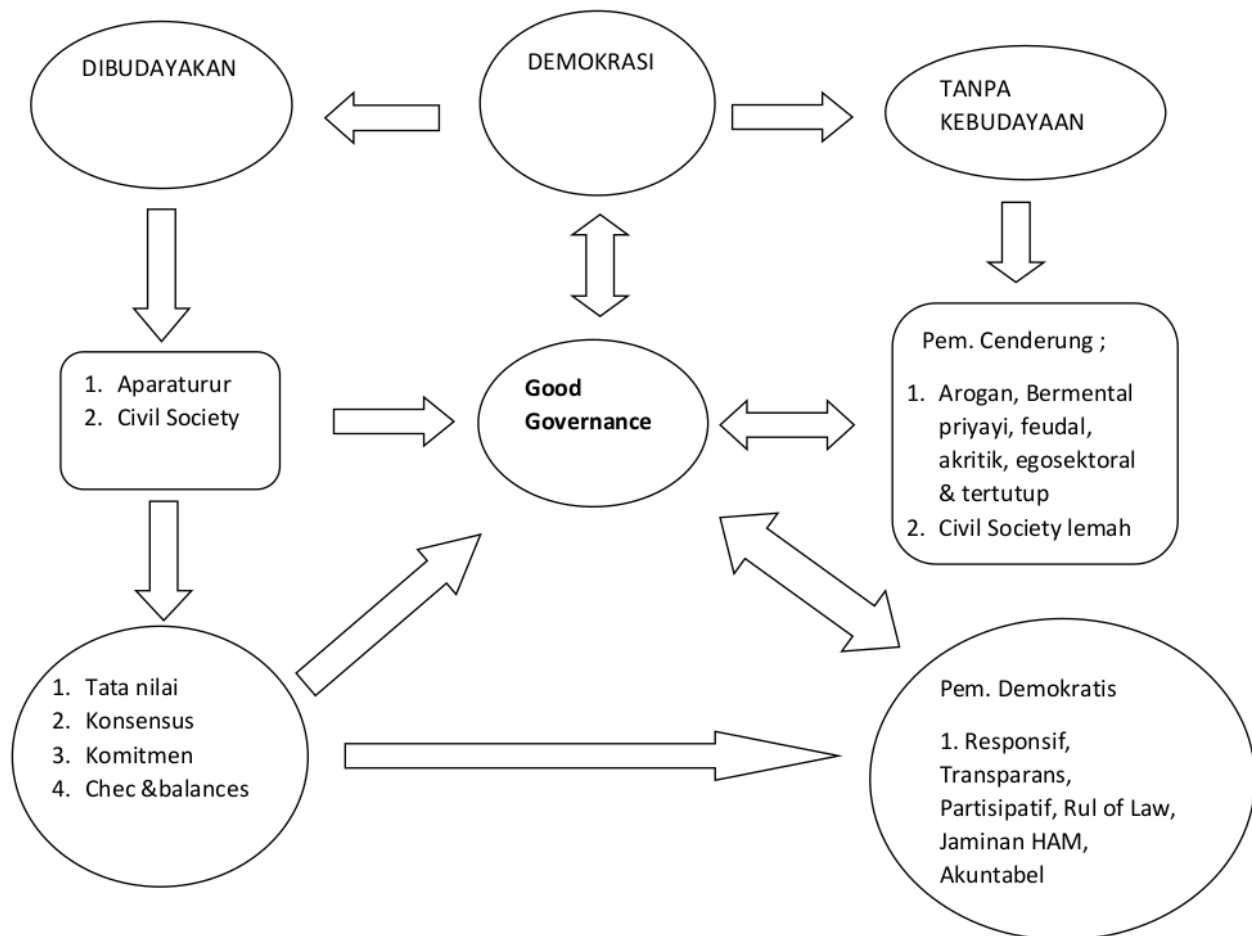
akuntabel. Nilai-nilai yang menopang budaya demokrasi antara lain; *moderation, tolerance, civility, knowledge, participation* (Diamond). Budaya demokrasi juga membutuhkan petanggung jawaban kepada rakyat, serta terbukanya kesempatan kepada semua pihak (Amartya Sen).

Transformasi budaya demokrasi menurut Budimansyah dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu; *pertama*, menggali potensi diri, mengevaluasi dan memaksimalkan, nilai-nilai unggul untuk mendorong perkembangan karakter bangsa yaitu kejujuran, keadilan dan tanggung jawab, *Kdua*; mendorong interaksi yang sehat di kalangan anggota masyarakat dengan menjunjung tinggi prinsip kesamaan derajat, kesamaan atas keterlibatan, dan keterbukaan yang merupakan habitat tumbuh suburnya nilai-nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan toleransi. *Ketiga*; pola interaksi yang sehat merupakan modal tumbuhnya komunitas responsif yang mengacu pada keseimbangan.

Berdasarkan uraian di atas dan dengan mereduksi pandangan Immanuel Kant (Peursen 1988) tentang budaya maka ciri khas pengembangan budaya demokrasi dalam kinerja aparatur harus berada dalam kemampuan aparatur untuk mengartikulasikan dengan nilai-nilai unggul (karakter) bangsa, agar tugas, tanggung jawab dan kinerja aparatur dapat juga berperan sekolah atau laboratorium dalam memifestasi prinsip-prinsip demokrasi, di mana aparatur bisa belajar dan mengembangkan (mempraktikkan) nilai-nilai demokrasi, sehingga aparatur tidak hanya memahami demokrasi tetapi sekaligus mampu mengevaluasi dan menjadikan kinerja birokrasi sebagai wahana bagi pengembangan budaya demokrasi.

Pentingnya pengembangan budaya demokrasi pada kinerja aparatur dalam pelaksanaan pemerintahan daerah yang baik dapat dibuat dalam bagan 3.1 berikut.

Bagan 3.1. Pengembangan Budaya Demokrasi dan relevansinya Terhadap Pelaksanaan *Good Governance*



Dari bagan di atas dapat dijelaskan bahwa sistem pengelolaan pemerintahan daerah tanpa budaya demokrasi sulit untuk mewujudkan apa yang Namanya good governance, yang terjadi justru cenderung melahirkan prototipe birokrasi pemerintahan yang arogan. Kekuasaan yang bersumber dari rakyat atau ditunjuk oleh pejabat yang dipilih langsung oleh rakyat, bukannya untuk melayani masyarakat, tetapi memupuk rasa hormat selaku pejabat yang selalu butuh dilayani (mentalitas priyayi). Fungsi akekuasaan yang diantaranya mesti diperankan sebagai *leader* dan *educator* dalam menuntun dan menggerakkan sumber daya organisasi dalam mentransformasikan ide, gagasan dan sistem nilai yang menjadi acuan dan farameter sistem kinerja dalam pengambilan kebijakan, telah dipoles sedemikian rupa hanya untuk orang dan kalangan tertentu dengan dalil “rahasia” padahal ujungnya adalah menyumbat ruang kompetisi, jadi kalau bukan “saya dan golongan saya” yang lain seolah-olah tidak bisa (feodal dan primordialistik). Ciri khas lain dalam suasana semacam ini kinerja aparatur menjadi semakin ertutup, tidak transparan, kurang responsif, tidak suka pada kritik, dan ironisnya daya kriti dan posisi tawar civil society melemah, akhirnya *sharing power* dan *chec and balances* di ruang public (*public share*) turut menjadi lemah.

1
Berbed dengan ketika **budaya demokrasi** dikembangkan **dalam kinerja aparatur dan** dalam organisasi **civil society**, maka pemerintahan daerah yang baik (*good governance*) cenderung akan mengalami penguatan kearah penerapan prinsip-prinsip transparansi, partisipatif, responsive, rule of law, akuntabilitas, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, karena dikalangan aparatur maupun civil society terdapat kesadaran, pengetahuan dan komitmen terhadap nilai-nilai fundamental demokrasi konstitusional. Jadi di sini memungkinkan adanya sinergi, koordinasi dan dinamika antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam perumusan kebijakan, implementasi, dan pengawasan melalui keterampilan partisipasi aktif masyarakat (*civil society*) di ruang public (*public share*).

3. Peran PKn terhadap Penguatan Good Governance

Dalam bahasan sebelumnya mengenai good governance telah dijelaskan bahwa paradigma pemerintahan daerah yang baik dewasa ini bertumpu di atas tiga pilar yaitu: pemerintah, sector swasta dan masyarakat (*civil society*). Masing-masing memiliki fungsi dan peran sesuai bidang tupoksinya, kerja sama dan sinergitas antara tiga elemen ini menjadi syarat mutlak bagi terbangunnya good governance dalam tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Disisi lain penerapan desentralisasi sebagai wujud konkrit pelaksanaan Otonomi Daerah telah pula menjadi bagian strategis dalam memperteguh konsepsi good governance, dimana selain kewenangan besar yang ada pada pemerintah daerah, masyarakat juga diberi ruang untuk ikut berperan aktif berpartisipasi di ruang public dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan pembangunan dan pemecahan masalah yang dihadapi pemerintah daerah.

Oleh karena itu apabila pemerintah daerah mengabaikan prinsip-prinsip pemerintahan daerah yang baik, dengan tetap menonjolkan praktik birokrasi feodal yang hanya memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan golongannya, baik dengan praktik maal-administrasi maupun dengan cara-cara melawan hukum, maka bukan saja akan memperlambat penciptaan good governance tetapi juga akan berhadapan dngan kekuatan masyarakat (*civil society*) yang telah terinformasi dan mengalami proses transformasi sosial kultural sebagai kekuatan penekan yang bisa menggugat kredibilitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan boleh jadi akan berujung pada pemazulan kekuasaan pemerintah daerah.

Dalam konteks ini maka pendidikan kewarganegaraan dapat menjadi bagian strategis bagi penguatan pemerintahan daerah yang baik melalui proses pencerdasan, pendewasaan dan pembentukan **warga negara yang baik**, partisipatif, demokratis, dan **bertanggung jawab**. Sebab pemerintahan daerah yang baik (*good governance*) selain membutuhkan aparatur birokrasi yang kompeten, professional, transparan, responsive, dan akuntabel, juga membutuhkan topagan sosial kultural masyarakat secara dinamis

dan kondusif yang diindikasikan adanya peran dan partisipasi aktif warga masyarakat di ruang public yang umumnya dilakukan oleh warga masyarakat yang telah tercerahkan melalui proses pendidikan plus di dalamnya adalah pendidikan kewarganegaraan.

Relevansi pendidikan kewarganegaraan bagi penguatan pemerintahan daerah yang baik ini menjadi semakin terasa diperlukan bersamaan dengan tuntutan untuk dilakukannya reformasi birokrasi, namun pada kenyataannya reformasi birokrasi sebagaimana ditegaskan Hamengkubuwono X (2009) ternyata baru sebatas menyentuh aspek administrasi dan kelembagaan (*hard side of change*) yang mudah diidentifikasi, sementara *soft side of change* yang mengarah pada perubahan karakter dan kultur birokrasi belum banyak disentuh, akibatnya *mindset* birokrasi pemerintahan daerah tetap saja sulit berubah walaupun periode pemerintahan daerah terus berubah sesuai mekanisme pemilihan umum kepala daerah. Sehingga diharapkan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang baik, yang mampu melakukan privatisasi nilai-nilai swasta (*entrepreneurship*) ke sector public seperti yang ditegaskan Budi Setiono (2002), atau ingin menjadikan pemerintahan daerah katalis-*entrepreneur* yang berorientasi pada pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan (masyarakat) seperti yang ditegaskan Osborne dan Gaebler (Mardiasmo, 2004), semuanya menjadi sulit dicapai, tanpa perubahan *mindset* aparatur, daya kritis dan dukungan partisipasi masyarakat dalam suasana cemerlang.

Pendidikan kewarganegaraan didesain untuk mengemban misi mempersiapkan generasi muda bangsa sebagai warga negara yang baik (*good citizen*), memiliki akhlak (*civic virtue*) dan segudang kompetensi keilmuan (*civic knowledge*), dan keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) maupun kecakapan partisipatif (*participation skills*), yang dengan kompetensi dan kecakapan itu warga negara akan mampu mengembangkan peran dan tanggung jawabnya (*civic responsibility*) sebagai bagian yang tak dapat dilepaspisahkan dari dinamika kehidupan masyarakat yang multikultural dan multi interest (*civic disposition*) dengan tetap komitmen (*civic commitment*) berpegang pada nilai-nilai fundamental demokrasi konstitusional.

⁴ Pada tataran kurikuler “pendidikan kewarganegaraan” baik substansi, proses pembelajaran maupun efek sosial kulturalnya senagaja dirancang dan diprogramkan untuk mewujudkan program-program pendidikan demokrasi yang bermuara pada pembentukan karakter bangsa Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk menumbuhkan karakter warga negara baik privat, seperti tanggung jawab moral, disiplin diri dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu, maupun karakter public, misalnya kepedulian sebagai warga negara, kesopanan, mengindahkan aturan main (*rule of law*), berpikir kritis dan kemauan untuk mendengar, bernegosiasi dan berkompromi (Winataputra & Budimansyah 2007: 192).

Olehnya itu pendidikan kewarganegaraan perlu mendapat perhatian semua pihak beresamaan dengan harapan mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang demokratis dan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good governance*). Sebab keduanya hanya mungkin manakala ditopang dan dipelihara oleh warga negara yang mempunyai pengetahuan, akhlak yang mulia, kecakapan, karakter, tanggung jawab dan komitmen yang dibutuhkan. Tanpa adanya komitmen warga negara terhadap nilai dan prinsip fundamental demokrasi konstitusional dan nilai-nilai keadaban, maka *good governance* dan demokrasi dalam suasana kehidupan yang terbuka dan bebas ini tak mungkin terwujud.

SIMPULAN

1. Kinerja aparatur dalam menerapkan prinsip transparansi, partisipatif, akuntabel, adil, taat hukum dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat merupakan prasyarat dari pemerintahan daerah yang baik, bukan tujuan dari pemerintahan daerah itu sendiri, sehingga keberhasilan pelayanan public dan pembangunan daerah tidak dapat dilihat sebatas pendekatan normative penerapan prinsip-prinsip tersebut, tetapi perlu dilihat dari seberapa jauh penerapan prinsip-prinsip tersebut pada kinerja aparatur dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat.
2. Kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan public merupakan ruang strategis bagi pengembangan budaya demokrasi dan pemerintahan daerah yang demokratis tidak cukup pada sebatas memahami demokrasi tetapi siklus kinerja aparatur perlu mengoperasionalisasi nilai-nilai demokrasi dalam relasi struktur dan sosial kultural yang memberdayakan masyarakat, memberikan pengakuan yang lebih luas terhadap hak-hak public, menghargai pluralism, lepas dari ego sektarianisme atas dasar kelompok politik, status sosial ekonomi, suku dan agama.
3. Keinginan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik perlu dibarengi dengan upaya peningkatan kinerja aparatur melalui upaya-upaya yang sistemik, terpadu dan berkesinambungan, menyentuh aspek geologi, budaya, karakter, pengetahuan, dan keterampilan kewarganegaraan, merubah *mindset* aparatur untuk memampukan dirinya menjadi mnusi penuh arti, berdedikasi tinggi, bertanggung jawab dan professional dalam kinerja penyelenggaraan tugas-tugas pelayanan public, dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi konstitusional yang merupakan konten dan tujuan pendidikan kewarganegaraan, olehnya itu gerakan pendidikan kewarganegaraan perlu mendapat perhatian semua komponen bangsa karena dengannya dapat memperkuat pemerintahan daerah yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Budimansyah, Dasim, 2008, Pembelajaran Pendidikan Kesadaran berdemokrasi, PT. Gnesindo.

Budimansyah, Dasim, 2010, Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Untuk membangun Karakter Bangsa, Bandung: Widya Aksara Press.

Buwono X, Sri Sultan Hamengku, 2009, Pengantar Reformasi Kepemrintahan Dalam menghadapi Era demokrasi dan Pasar Terbuka, dalam buku Governance Reform di Indonesia : Mencari Arah Kelembagaan Politik yang Demokratis dan Birokrasi yang Profesional, Editor Agus Pramusinto & Wahyudi Kumorotomo, Yogyakarta: Gaya Media.

Darmawan, Cecep, 2009, Memahami Demokrasi Perspektif Teoris dan Empiris, Bandung: Pustaka ulia Press.

Etzioni, Eva Halaevy, 2011, Demokrasi dan Birokrasi Sebuah Dilema Politik, Yogyakarta: Matapena Institue, penyadur Sufiansyah dkk Dari judul Asli Bureucracy and Democracy A Political Dilema.

Faulks, Keith, 2010, Sosiologi Politik, Pengantar Kritis, bandung: Nusa Media, Diterjemahkan oleh Helmi Mahdi dan Shohifullah

Istianto, Bambang, 2009, Manajemen Pemerintahan Dalam perspektif Pelayanan Publik, jakrta: mitra wacana Media.

Mardiasmo, 2004, Otonomi dan manajemen Keuangan Dawrah, Yaogyakarta: ANDI.

Megawangi, Ratna, 2004, Pendidikan Karakter, Solusi yang tepat Untuk Membangun Bangsa, Jakarta: BPMIGAS Energi.

Muhammad, Fadel, 2008, Reinventing Local Governmen, Pengalaman Dari daerah, Jakarta: PT Gramedia..

Peursen, Van C.A., 1988, Strategi Kebudayaan, Yogyakarta: Kanisius, Diterjemahkan oleh Dick Hartoko.

Rohman, Ainur dkk, 2009, Partisipasi dan Demokrasi dalam Pembangunan, Malang: Program Sekolah Demokrasi.

Sedarmayanti, 2003, Good Governance, (Kepemerintahan Yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah, Upaya membangun Organisasi dan Efisiensi Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan, Bandung: Mandar Maju.

Setiono, Budi, 2002, jarring Birokrasi Tinjauan dari Aspek Politik dan Administrasi, Bekasi: PT Gugus Press.

Suparno, Eman, 2010, Grand Strategi Indonesia Kajian Komprehensif manajemen Pembangunan Negara bangsa, Milestone, Jakarta Selatan.

Artikel 10

ORIGINALITY REPORT

21 %
SIMILARITY INDEX

20 %
INTERNET SOURCES

2 %
PUBLICATIONS

4 %
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 text-id.123dok.com 5 %
Internet Source

2 repository.iainambon.ac.id 5 %
Internet Source

3 digilib.stkippgri-blitar.ac.id 2 %
Internet Source

4 www.scribd.com 2 %
Internet Source

5 repository.upi.edu 2 %
Internet Source

6 Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia 1 %
Student Paper

7 core.ac.uk 1 %
Internet Source

8 pt.scribd.com 1 %
Internet Source

9 eprint.unipma.ac.id 1 %
Internet Source

10

makalahdede008ip.blogspot.com

Internet Source

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On